

Analisis Kinerja Pelayanan Uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi

Wandi Gunawan^{*1}, Fitriana Lestari², dan Prasetyo Hartanto³

¹Universitas Nusa Putra, wandi.gunawan_mn19@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra, fitriana.lestari@nusaputra.ac.id

³Universitas Internasional Jakarta, prasetyo.hartanto@uniji.ac.id

Abstract: The transportation sector faces significant challenges related to traffic accidents and environmental concerns. Among the factors influencing traffic accidents, the condition of motor vehicles plays a crucial role. Regular motor vehicle testing is essential for reducing accidents and managing environmental issues. The Motor Vehicle Testing Section (PKB) and Workshop Division of Sukabumi Regency are responsible for conducting routine examinations of motor vehicles in the region. To achieve their objectives, these departments must establish a reliable and responsible motor vehicle testing service system. The primary goals of this research are twofold: first, to evaluate the performance of the PKB and Workshop Division in providing periodic vehicle fitness assessments, and second, to identify the factors that either support or hinder their performance in conducting periodic vehicle fitness tests. The study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Key informants include the head of the Motor Vehicle Testing Section and Workshop Division, the treasurer, technical staff, and vehicle owners undergoing periodic fitness tests. The findings of this research are analyzed using an interactive data analysis model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. This methodology ensures that data are systematically organized and analyzed to facilitate meaningful conclusions. The research contributes valuable insights into the performance of the Motor Vehicle Testing Section and Workshop Division in delivering periodic vehicle fitness assessment services. Moreover, it highlights various factors impacting their performance in this regard. The study offers recommendations to enhance the efficiency and effectiveness of the vehicle fitness testing process, ultimately promoting safer and environmentally responsible transportation in Sukabumi Regency.

Keywords:: Vehicle Fitness Assessment; Transportation Safety; Motor Vehicle Testing; Performance Evaluation

Klasifikasi JEL:

* E-mail penulis terkait: wandi.gunawan_mn19@nusaputra.ac.id

ISSN: xxxx-xxxx (Print); ISSN: 3047-2393 (Online)

<https://senmabis.nusaputra.ac.id/>

PENDAHULUAN

Masalah strategis sektor transportasi adalah kecelakaan lalu lintas dan masalah lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Kendaraan bermotor diuji untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mengelola masalah lingkungan. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor secara berkala di Kabupaten Sukabumi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi harus mampu menerapkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dapat akurat dan bertanggung jawab. Kehadiran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu faktor terpenting keberhasilan Kabupaten Sukabumi dalam implementasi berkesinambungan arahan pemerintah dalam pengaturan lalu lintas perkotaan berbasis kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Masalah strategis sektor transportasi adalah kecelakaan lalu lintas dan masalah lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Kendaraan bermotor diuji untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan mengelola masalah lingkungan. Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor. Peraturan Menteri Jalan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan

bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagianbagian kendaraan bermotor, trailer, trailer, kendaraan khusus dan rangka utama untuk memenuhi persyaratan teknis dan pemeriksaan.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi melakukan pemeriksaan rutin kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dilakukan agar kendaraan tidak memiliki cacat teknis yang tidak diketahui yang dapat membahayakan lalu lintas, penumpang, dan lingkungan. 5 Untuk mencapai tujuan tersebut, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi harus mampu menerapkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dapat akurat dan bertanggung jawab.

Keberadaan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu faktor terpenting keberhasilan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan arahan pengelolaan lalu lintas perkotaan yang berkelanjutan dari pemerintah yang berbasis keselamatan masyarakat dan lingkungan

Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya untuk mendapatkan berbagai pelayanan, termasuk di bidang transportasi, merupakan tantangan dan tanggung jawab besar Kementerian Perhubungan dalam menciptakan transparansi dan kenyamanan di bidang transportasi.

Dinas Perhubungan berusaha menciptakan sistem transportasi yang aman, lancar dan sesuai agar masyarakat merasa nyaman saat berkendara. Peningkatan sarana, prasarana

dan sarana transportasi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pernyataan dan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Kinerja Pelayanan Kelayakan Uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi”. Peneliti menilai perlu adanya kajian khusus pada kinerja seksi pengujian kendaraan bermotor. Karena unjuk kerja ini dikenal dengan profitabilitas kendaraan bermotor, maka ditemui kendala dalam proses pengujian yang dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan unjuk kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pada pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri, agar rumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal (Silaen et al., 2022). Evaluasi kinerja dalam rangka pengawasan harus dapat memberikan informasi objektif mengenai tingkat capaian pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, serta rekomendasi mengenai tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Sedangkan evaluasi kinerja pada tahap pertanggungjawaban harus dapat memberikan dan analisis objektif mengenai perkembangan pelaksanaan, perubahan atau penyesuaian yang telah

dilakukan berikut alasannya dan penilaian tingkat capaian kinerja dalam jangka waktu tertentu (Tsauri, 2014).

Menurut Husein Umar 2004 dalam (Tsauri, 2014), Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Kinerja

(Silaen et al., 2022) Manajemen kinerja bertujuan untuk membangun harapan yang jelas dan pemahaman tentang:

- 1) Tujuan Strategis Manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem umpan balik terhadap kinerja pegawai.
- 2) Tujuan Administratif Kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif, seperti; penggajian, promosi, pemberhentian pegawai dan lain-lain.
- 3) Tujuan Pengembangan Manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Pegawai yang tidak berkinerja baik perlu mendapat pemberdayaan melalui training,

penempatan yang lebih cocok dan sebagainya. Pihak manajemen perlu memahami apa saja yang menyebabkan pegawai tidak berkinerja baik, apabila faktor skill, motivasi, dan lain-lain sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan kerjanya.

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan dalam mewujudkan sasaran, misi, visi yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Fatrunisah et al., 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi 2005 dalam (Tsauri, 2014) kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut:

- 1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
- 2) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
- 3) Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
- 4) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan *database* untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- 5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi

Levinne dkk. dalam Ratminto dan Atik 2020 dalam (Abdullah Maruf, 2014)

mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu:

- 1) Responsivitas (responsiveness)
Responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi public dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 2) Responsibilitas (responsibility)
Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisif atau eksplisit.
- 3) Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Kinerja Intansi

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar (Utari & Sugiono, 2019).

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari Pemerintah di Kabupaten/Kota harus berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal. Untuk itu perlu

adanya suatu evaluasi kinerja agar dapat mengetahui progress realisasi kinerja yang dihasilkan, maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran kinerja (Natika & Putri, 2022).

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara berkala enam bulan sekali dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum (Amalia et al., 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, tujuan transportasi adalah untuk mewujudkan lalu linta dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan menunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli

masyarakat, maka untuk mewujudkan hal tersebut semua peruntukannya harus memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dijalankan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Sasaran pengujian kendaraan bermotor meliputi kegiatan memeriksa, menguji, mencoba dan meneliti diarahkan kepada setiap kendaraan bermotor wajib uji secara keseluruhan pada bagian-bagian kendaraan secara fungsional dalam sistem komponen serta dimensi teknisnya baik maupun berdasarkan persyaratan teknis yang objektif (Iswarah et al., 2018).

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar atau landasan bagi pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan rumusan masalah. Berkaitan dengan konsep dan teori tersebut di atas, kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

H1. Untuk mengetahui kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan pelayanan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor.

H2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pelayanan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam penyajian data dijelaskan dengan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data (Ahyar et al., 2020).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Dinas Kabupaten Sukabumi.

Jenis dan Sumber Data

Adapun informan yang dipilih sebagai sumber penggalan data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi.
- 2) Bendahara Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi.
- 3) Pegawai Teknis/Penguji Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi.
- 4) Pemilik kendaraan yang menjalani proses uji kelayakan kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Perbengkelan Kabupaten Sukabumi.

(Ahyar et al., 2020) Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi dalam dua jenis berdasarkan sumbernya, yaitu:

- 1) Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan obyek penelitian untuk kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif biasanya data primer diperoleh melalui wawancara, observasi maupun wawancara kelompok yang biasa dikenal sebagai teknik FGD (Fokus Group Discussion).
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui buku-buku, kepustakaan, dokumentasi dan keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak lain sehingga siap digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui buku-buku.

Teknik Pengumpulan Data

(Ahyar et al., 2020) Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara Di dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut wawancara mendalam (in-depth interview-ing). Dalam teknik wawancara mendalam ini, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open-ended” dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu

dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

- 2) Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan terhadap peristiwa dan objek yang terkait dengan tujuan penelitian.
- 3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip ataupun keterangan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil dari Teknik pengumpulan data tersebut kemudian akan dilakukan 2 jenis pengujian data, yaitu:

- 1) Uji Validitas Data, data harus diupayakan kemantapan dan kesahihan atau kebenarannya. Untuk mencapai hal tersebut, dalam penelitian ini validitas data dikembangkan dengan teknik triangulasi data atau yang biasa disebut dengan triangulasi sumber.
- 2) Uji Triangulasi Data, memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Di sini tekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik data atau yang lainnya. Peneliti bisa memperoleh dari nasasumber (manusia) yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan

informasi dari nara sumber lainnya (Ahyar et al., 2020).

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen utama. Menurut Miles dan Huberman dalam H. B. Sutopo (2002: 94-96), ketiga komponen tersebut adalah:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah komponen pertama dari analisis data, yang menekankan, mempersingkat, memfokuskan, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian darinya.

2) Sajian Data

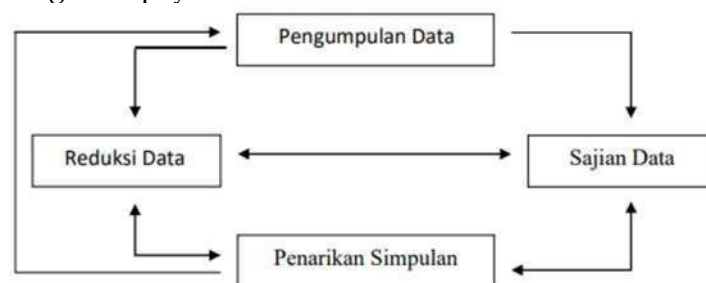
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna

peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3) Penarikan Simpulan

Pada awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dari hal-hal yang ditemuinya, mencatat aturan, rumus, pernyataan, kemungkinan konfigurasi, arah sebab akibat dan berbagai hubungan untuk memudahkan kesimpulan.

Dalam proses analisis, ketiga komponen tersebut bergerak secara interaktif dengan proses pengumpulan data dalam satu siklus. Data yang digali dan dikumpulkan di lapangan di analisis berdasarkan konteks, input, dimensi proses dan produk, kemudian di analisis hubungan antara satu dimensi. Menganalisis efek program memperhitungkan keseluruhan hubungan dengan konteks, input, dan dimensi proses program. Proses analisis data dengan menggunakan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Analisis Interaktif

Sumber: H.B. Sutopo, 2002: 96

REFERENCE

- Abdullah Maruf, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan* (B. R. Hakim (ed.)). Aswaja Pressindo
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed., Issue April). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Amalia, A. R., Razak, A. R., Taufik, A., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2022). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKEP. *Journal.Unismuh*, 3.
- Fatrunisah, I., Afifuddin, & Suyeno. (2022). EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende). 15(4), 30–38.
- Iswarah, A., Idris, A., & Hasanah, N. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PADAANGKUTAN KOTA DI KOTA SAMARINDA). *Ejournal.Ipfisip- Unmul.Ac.Id*, 6(4), 1989–2002.
- Natika, L., & Putri, G. N. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *Ejournal.Unsub*, 3(1), 26–38.
- Rahmawan, H. B. (2022). EVALUASI KINERJA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERBENGKELAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKABUMI.
- Silaen, N. R., Syamsuriansyah, Chairunnisah, R., Sari, M. R., Mahriani, E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Masyruroh, A. H. A., Satriawan, D. G., Lestari, A. S., Arifudin, O., Rialmi, Z., & Putra, S. (2022). Kinerja Karyawan. In *Kinerja Karyawan* (PERTAMA). WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. http://digilib.uinsgd.ac.id/40781/1/KINERJA_KARYAWAN_2_CETAK.pdf#page=3
- Supirman, & Murdani. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan Bus Berdasarkan Uji Kir Menggunakan Metode Promethee II (Studi Kasus: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara). *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 7(2), 326–333. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v7i2.2123>
- Tsauri, S. (2014). MANAJEMEN KINERJA Performance Management. In *STAIN Jember Press*.
- Utari, W., & Sugiono. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI KOMPETENSI PENGUJI KENDARAAN DI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PROBOLINGGO. 4(1).
- Yanuarsih, R. (2017). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN “TAKSI ONLINE” DI KOTA SURABAYA (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Tra. 22, 1–10